

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KERJA
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**ELARDI FILBERT OSSORIO SIHOMBING
NPM. 1816041078**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KERJA
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ELARDI FILBERT OSSORIO SIHOMBING

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KERJA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Elardi Filbert Ossorio Sihombing

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, dengan tujuan untuk mengubah perilaku seorang kriminal menjadi pribadi yang berperilaku baik sesuai dengan nilai, norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai pengimplementasian program pembinaan kerja terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melihat tiga indikator komponen-komponen implementasi program menurut Charles O. Jones (1984) yaitu Tahap Interpretasi, Tahap Pengorganisasian dan Tahap Aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori Charles O. Jones (1984) penerapan indikator pengorganisasian dalam program bimbingan kerja di Lapas Kelas I Bandar Lampung menghadapi sejumlah hambatan seperti minimnya keikutsertaan warga binaan dalam berpartisipasi diprogram tersebut meskipun terdapat struktur tim pelaksana yang baik dan dukungan dari berbagai pihak. Faktor pendukung seperti fasilitas, tenaga pengajar yang kompeten, dan dukungan anggaran memberikan kontribusi positif, tetapi masalah utama terletak pada kurangnya kerjasama dengan pihak luar dan keterbatasan sarana prasarana yang perlu diperbarui. Berdasarkan hasil penelitian indikator interpretasi dan indikator aplikasi terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas pembinaan di Lapas, antara lain: Kekurangan Peralatan, Kekurangan Dana, dan Latar Belakang Pendidikan Warga Binaan. Interpretasi kebijakan di Lapas ini, para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai kebijakan yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyamakan persepsi, tidak semua pihak mengerti kebijakan dengan cara yang sama. Upaya sosialisasi (penyuluhan) dan monitoring (pengawasan) telah dilakukan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, hasilnya masih beragam.

**Kata Kunci : Implementasi Program, Pembinaan Kerja, Narapidana,
Lembaga Pemasyarakatan**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF A PRISONER WORK DEVELOPMENT PROGRAM IN CLASS I COMMUNITY INSTITUTIONS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

Elardi Filbert Ossorio Sihombing

Implementation of construction to inmates Efforts to return prisoners to good society are very important, with the aim of changing the behavior of a criminal into a person with good behavior that conforms to values, norms and applicable law in Indonesia. The aim of this research is to analyze the implementation of job development programs for prisoners at Class 1 Community Institutions of Bandar Lampung City. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation by looking at three indicators of program implementation components according to Charles O. Jones (1984), namely the Interpretation Stage, Organizing Stage and Application Stage. The results of this research show that Based on the theory of Charles O. Jones (1984), the implementation of organizational indicators in the job guidance program at Class I Prison in Bandar Lampung faces a number of obstacles such as the lack of participation of inmates in participating in the program even though there is a good implementation team structure and support from various parties. Factor Supporters such as facilities, competent teaching staff, and budget support provide positive contributions, but the main problem lies in the lack of cooperation with external parties and limited infrastructure that needs to be updated. Based on the results of research on interpretation indicators and application indicators, there are several factors inhibiting the effectiveness of coaching in prisons, including: Lack of Equipment, Lack of Funds, and Educational Background of Inmates. Interpretation of policies in prisons, stakeholders have different understandings regarding the policies implemented. This shows that despite efforts to equalize perceptions, not all parties understand policies in the same way. Socialization (counseling) and monitoring (supervision) Efforts have been carried out to ensure a better understanding of the policy, but the results are still mixed.

Keywords: Program Implementation, Job Development, Prisoners, Correctional Institutions

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN
KERJA NARAPIDANA DI LEMABAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Elardi Filbert Ossorio Sihombing

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1816041078

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Nana Mulyana, S.IP., M.Si
NIP. 197106152005011003

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 198406302015042002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meillyana, S.IP., M.A.
NIP. 197405202001122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Nana Mulyana, S.IP., M.Si**



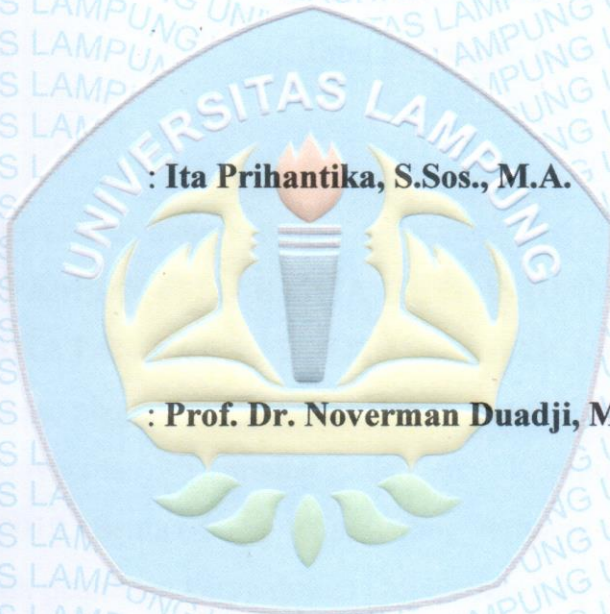
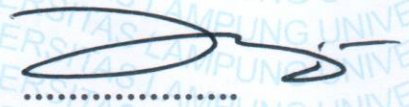
Sekretaris

: **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, M.Si.

NIP. 197608212200003001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Maret 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Elardi Filbert Ossorio Sihombing
Nomor Pokok Mahasiswa : 1816041078
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KERJA NARAPIDANA DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA BANDAR LAMPUNG”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025

Penulis



Elardi Filbert Ossorio Sihombing
1816041078

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Elardi Filbert Ossorio Sihombing, dilahirkan di Medan pada 27 Juli 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Martin Sahat Sihombing dan Ibu Marliana Elly Kristina Tanjung. Penulis mengawali pendidikan di SD Swasta Santa Lusia Bekasi dan selesai pada tahun 2010, SMP Negeri 12 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2013 dan SMA Negeri 12 Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di Organisasi Mahasiswa CAKRAWALA dan HIMAGARA. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Selama 40 hari pada 10 Januari sampai 19 Februari 2022.

MOTTO

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Yang jalan kaki juga bisa sampai tujuan dan yang berlari pun bisa terjatuh.”

(Amsal 16:9)

Jangan takut akan masa depanmu. Dia yang berjanji, Dia juga yang akan menepati tepat pada waktunya.”

(Ulangan 31:6)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadanya.

Saya persembahkan Skripsi ini kepada mereka yang terkasih :
Ibu saya Marliana Elly Kristina Tanjung dan Ayah saya Martin Sahat Sihombing sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku.

Kepada saudara-saudara saya yang selalu menumbuhkan semangat dan dukungan baik secara materi maupun emosional dalam pengerjaan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KERJA NARAPIDANA DI LEMABAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi

penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terutama pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Mbak Wulan dan Ibu Uki yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.

6. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Muda Husni, Bc.IP., SH., MM selaku Kepala Bidang Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kota Bandar Lampung, Bapak Edy Suyono, S.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung, Bapak Ade Wijaya, S.I.P. selaku Kepala Seksi Sarana Kerja, serta Bapak Adi dan Fahri selaku Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
7. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya. Sangat teristimewa Orang Tua saya, Marlina Elly Kristina Tanjung dan Bapak Martin Sahat Sihombing dan kaka saya Yemima Ruth Sihombing yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.
8. Saudara-saudara terkasih yang selalu mendukung, selalu mengajak belajar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita masing-masing sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya. Semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan semua keluarga kita.
9. Terimakasih kepada Opung, Tulang, Nangtulang, Tante, Uda, Lae, Naureen dan semua keluarga terkasih yang telah mendukung dari saya segala sisi dalam menyelesaikan studi perkuliahan saya.
10. Teman-teman SCC yang selalu mendukung dalam menyelesaikan pendidikan ini Abel Saing, Tangido Sinaga, Moi Sianturi, Ferry Sirait, Daniel Siagian, Ikel Simanjuntak, Darmon Siahaan, David Sitanggang, Sergio Sinaga.
11. Teman-teman dekat kuliah Administrasi Negara angkatan 2018 Daniella, Farhan, Agung, Ghina, Kadek, Anggara.

12. Teman-teman Cakrawala yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu telah memberikan dukungan dalam skripsi.
13. Teman-teman Gereja Maranatha Rawalumbu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu telah memberikan dukungan dalam skripsi.
14. Teman-teman HIMAGARA yang mendukung dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi Andika, Firdi, Arsyah, Geri, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Teman- Teman Mahasiswa Pecinta Alam yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu telah memberikan dukungan dalam skripsi.
16. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
17. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Oppung Zevanya Tanjung yang telah memberi dukungan baik moral dan materi untuk memperoleh gelar sarja di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
18. Semoga Tuhan YME selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025
Penulis,

Elardi Filbert Ossorio Sihombing

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Implementasi Program.....	11
2.2.1 Konsep Implementasi Program	13
2.3 Tinjauan Pembinaan Kerja	17
2.4 Tinjauan Narapidana	19
2.5 Tinjauan Lembaga Per masyarakatan.....	21
2.6 Kerangka Pemikiran	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26

3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Analisis Data	28
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	29
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Lapas Kelas I Bandar Lampung	31
4.1.1 Sejarah Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung	31
4.1.2 Visi dan Misi Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung	32
4.1.3 Organisasi dan Tata Kerja	32
4.1.4 Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Bandar Lampung 2024.....	34
4.2 Hasil Penelitian.....	34
4.2.1 Implementasi Program Pembinaan Kerja Narapidana di Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung.....	35
4.3 Pembahasan.....	63
V. PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah warga binaan berdasarkan rentan usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	2
Tabel 2 . Kegiatan Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.....	7
Tabel 3 . Informan Penelitian.....	27
Tabel 4. Gambaran Objek Observasi Penelitian	27
Tabel 5. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian	28
Tabel 6. Keadaan Pegawai Lapas Kelas I Bandar Lampung	34
Tabel 7. Kegiatan Kerja di Lapas Kelas I Kota Bandar lampung.....	34
Tabel 8. Jumlah WBP Kegiatan Kerja pada Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung 2024.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2 Pihak yang Terlibat dalam Program Pembinaan Kerja WBP	37
Gambar 3 WBP Aktif dalam Mengikuti Program Pembinaan Kerja	42
Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Bagi WBP Lapas Kelas I Bandar Lampung	50
Gambar 5. Praktik <i>Barber Shop</i> Oleh WBP Lapas Kelas I Bandar Lampung.....	53
Gambar 6. Pengawasan Rutin Pada Program Pembinaan Kerja	54
Gambar 7. SOP Pelaksanaan Program Pembinaan Kerja pada Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung 2024.....	57
Gambar 8. Kegiatan Pengelasan Pada Program Pembinaan Kerja	61
Gambar 9. Struktur Organisasi lapas kelas I Bandar Lampung	64

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang menduduki peringkat ke-54 dari 196 negara yang ada di dunia dalam kategori tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Data kepolisian RI menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Indonesia memang cukup tinggi dan semakin meningkat setiap tahunnya, tidak hanya itu variasi Tindakan kriminalitas juga semakin berkembang setiap tahunnya.

Data olahan World Prison Studies and crime Statistic dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari jumlah tahanan dan narapidana serta angka kejahatan yang terjadi di Indonesia. Data Lembaga studi penjara dunia bernama World Prison Studies menunjukkan jumlah perkembangan populasi tahanan dan narapidana di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana hal ini berbanding lurus dengan adanya peningkatan angka kejahatan yang ada di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh lembaga studi penjara dunia tersebut, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia pada tahun 2017 telah menembus angka 225.025 jiwa. Angka ini di perkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan angka kriminalitas di Indonesia (BPS RI, 2017).

Narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dengan cara melanggar hukum, atau melanggar Undang-Undang, yang dapat merugikan masyarakat secara moral maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan yang dibuat

setiap tahun tidak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat telah dihukum. Maka dari itu pidana penjara merupakan hal yang paling penting untuk menangani tindak kejahatan yang terjadi disekitar masyarakat. Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap seseorang yang terpidana didalam lembaga permasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Demikian halnya dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung yang sangat diharapkan peran sertanya di dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program pemerintah.

Tabel 1. Jumlah warga binaan berdasarkan rentan usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

No	Rentang Usia	Jumlah
1	20 Tahun Kebawah	30
2	20-30 Tahun	414
3	30-40 Tahun	597
4	40-50 Tahun	65
5	50 Tahun Keatas	42
Total		1148

Sumber : Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Lampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023

Dari data Tabel 1 menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung diisi oleh warga binaan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan warga binaan berjenis kelamin perempuan dan warga binaan anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung. Dari data diatas terlihat Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung diisi oleh 1148 orang warga binaan dimana jumlah warga binaan yang dominan berada pada rentang usia 30-40 tahun dengan jumlah 597 orang warga binaan. Berdasarkan mayoritas usia warga binaan yang berada di Lapas kelas I Bandar Lampung para warga binaan masih menduduki usia yang produktif, yang dimana program pembinaan kerja di Lapas Kelas I Bandar Lampung perlu di implementasikan dengan sangat baik. Adanya program pembinaan kerja mempunyai tujuan sebagai pemantauan proses memperbaiki kepribadian dan melatih narapidana untuk memiliki modal skill dalam menjalankan kehidupan ditengah masyarakat dan mengurangi pengulangan tindak pidana.

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Integrated Criminal Justice System (ICJS) adalah sistem peradilan pidana terpadu yang mengatur penegakan hukum pidana. ICJS mencakup proses penanganan perkara pidana mulai dari penyelidikan hingga pemasyarakatan. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan oleh Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung merupakan program pembinaan kerja kepada narapidana atau bisa disebut sebagai warga binaan. Program pembinaan kerja narapidana didasarkan pada sistem pemasyarakatan, dan telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, tujuan dari pembinaan kerja adalah program pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara (Sriwidodo & Haryanto, 2010). Termasuk untuk narapidana yang harus diberikan ekstra dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan kerja narapidana yang diawasi oleh polisi khusus permasyarakatan dari Lapas.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu polisi khusus permasyarakatan dan narapidana. Hal ini

dikarenakan keduanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil pra riset peneliti pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Maizar, Bc. IP., S.Sos., M.Si selaku Kepala Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa dalam melaksanakan program pembinaan kerja terhadap para warga binaan yang nanti kembali kemasyarakat dapat menjadi warga negara yang patuh terhadap peraturan hukum serta sanggup hidup bermasyarakat dengan baik, taat pada ajaran agamanya dan mampu menguasai keterampilan kemandirian sesuai dengan bakatnya. Dengan diadakannya kegiatan pembinaan kerja di Lapas Kelas I Bandar Lampung diharapkan bisa menjadikan program pembinaan di dalam Lapas dapat berkembang menjadi lebih baik. Hal ini akan berdampak baik kepada warga binaan sebab dengan baiknya program pembinaan ini bisa membuat warga binaan memiliki kesadaran hukum, mental dan rohani yang baik serta memiliki kemampuan di bidang tertentu untuk menunjang kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana di dalam Lapas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chasanah & Hidayat (2019) dengan judul “Implementasi Program Bimbingan kerja dalam Pemberdayaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”, dijelaskan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program bimbingan dalam pemberdayaan narapidana tentang pola pembinaan yang dibagi menjadi dua yaitu program kepribadian dan program kemandirian. Program tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan narapidana lebih dekat kepada Tuhan serta menjadikan warga binaan lebih produktif menuju manusia produktif yang berdaya guna. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa Lembaga pemasyarakatan di daerah tersebut juga memberikan pembinaan kepada narapidananya, untuk mempersiapkan kehidupan mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori Charles O. Jones pada indikator aplikasi. Indikator aplikasi adalah kegiatan dan Upaya pelaksanaan atau merealisasikan suatu program yang sesuai dengan rencana, pedoman, standar dan tujuan yang diinginkan.

Pembinaan kerja merupakan pembinaan yang dilaksanakan untuk membina sekaligus memberikan pembekalan keterampilan dan melatih kemampuan kerja bagi para narapidana dan tidak kalah penting dari pembinaan kepribadian yang mengajarkan meliputi akhlak dan budi pekerti narapidana. Pola pembinaan kemandirian ini dilaksanakan dalam Kegiatan Bimbingan Kerja yang terdiri dari unit-unit kerja yang ada di dalam Lapas. Pembinaan ini tentunya akan sangat baik bagi masa depan narapidana setelah ia dibebaskan. Mengingat adanya labelling yang diberikan oleh masyarakat bahkan pemerintah terhadap seorang mantan narapidana. Labelling ini merupakan sikap dari masyarakat yang seakan memberikan label tersendiri terhadap narapidana maupun mantan narapidana yang membuat narapidana maupun mantan narapidana seakan terdiskriminasi oleh masyarakat karena statusnya sebagai narapidana atau mantan narapidana.

Salah satu contoh perilaku labeling adalah, seperti adanya persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada saat melamar pekerjaan. Hal ini seakan mantan narapidana tidak dipercaya lagi karena masa lalunya yang pernah berbuat kesalahan dan telah tertutup kesempatannya untuk mencari lapangan pekerjaan. Perilaku labelling membuat banyak dari mereka kesulitan untuk beradaptasi dan tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kesulitan ini juga berdampak pada bidang ekonomi dimana mantan napi akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pembinaan kerja ini akan mempermudah narapidana dalam hal pekerjaan tanpa harus bergantung pada masyarakat dengan bekal keterampilan yang telah ia dapatkan selama berada di Lapas. Seorang mantan narapidana dapat menggunakan ilmu yang telah diberikan oleh petugas dalam bimbingan kerja sesuai dengan unit yang ia ikuti untuk bekerja.

Pelayanan narapidana pada intinya yaitu pelayanan yang berkaitan dengan dengan tujuan pemasyarakatan untuk mengubah perilaku seorang kriminal menjadi pribadi yang berperilaku baik sesuai dengan nilai, norma dan juga hukum yang berlaku di Indonesia, pembinaan di dalam Lapas dilakukan dalam dua bentuk pola pembinaan. Pola pembinaan tersebut, yaitu

pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, wajib dilaksanakan di setiap Lapas di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana. Keduanya bertujuan untuk membentuk softskill dan hardskill yang mana keduanya saling berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam membentuk softskill pembinaannya berupa pembinaan perilaku dalam pola pembinaan kepribadian dan hardskill yang berupa membina keterampilan dalam pola pembinaan kepribadian.

Kedua pola pembinaan tersebut akan menjadi kegiatan keseharian yang akan dilakukan oleh setiap narapidana selama menjalani masa pidananya yang akan dibimbing oleh para petugas Lapas. Mengingat jumlah kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia yang mencapai angka dua ratus ribu, dapat dibayangkan bagaimana pentingnya sebuah pembinaan dilaksanakan dalam pemasyarakatan untuk mengarahkan dan mengembalikan dan memperbaiki kepribadian pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat.

Di tiap-tiap Lapas yang ada di Indonesia, kegiatan kerja dilaksanakan dalam unit-unit bimbingan kerja yang biasa disebut dengan unit kerja. Unit-unit kerja tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat kelas dari sebuah Lembaga Pemasyarakatan, jenis ataupun gender dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang tinggal di dalam Lapas. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung atau yang sering disebut dengan Lapas Rajabasa telah dilaksanakan 6 unit bimbingan kerja yang disesuaikan dengan penghuni yang keseluruhan adalah laki-laki.

Tabel 2 . Kegiatan Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

No	Jenis Bimbingan Kerja	Jenis Keterampilan
1	Unit Sablon	Sablon kaos
2	Unit Bengkel	Mebel, perbengkelan dan las
3	Unit Seni	Bermusik
4	Unit pertanian dalam	Pertanian sayuran dan buah-buahan
5	Unit Kantin	Memasak dan berjualan makanan
6	Unit Keterampilan tangan	Menjahit dan pangkas rambut

Sumber : Data Lembaga Pemasyrakatan Kelas I Bandar Lampung, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat unit-unit kerja yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Bandar Lampung juga disesuaikan untuk narapidana. Unit kerja yang ada memudahkan narapidana untuk berwirausaha dengan keterampilan yang diberikan di unit kerja. Hal ini mendukung narapidana untuk memulai kehidupannya setelah bebas dari segi perekonomian.

Namun kekurangan atau permasalahan yang dialami oleh Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung pada pelaksanaan kegiatan kerja ini adalah jumlah peminat kegiatan kerja. Narapidana yang mengikuti kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung ini tergolong sangat minim. Dari jumlah penghuni mencapai lebih dari 1000 penghuni, narapidana yang mengikuti kegiatan kerja keseluruhan hanya 115 orang saja. Angka tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni lapas yang mencapai angka ribuan. Seharusnya Lapas harus melakukan segala kegiatannya secara maksimal untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menjadikan narapidana sebagai orang yang tidak akan mengulangi kesalahan dan menjadi warga negara yang baik. Tanpa terkecuali pelaksanaan kegiatan kerja narapidana karena kegiatan kerja ini akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi narapidana tapi juga bagi Indonesia. Karena secara tidak langsung, pelatihan yang dilaksanakan dalam pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas, turut meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia.

Melalui pemaparan latar belakang penelitian yang telah peneliti kemukakan, dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk menganalisis secara lebih mendalam akan implementasi program pembinaan kerja terhadap narapidana, karena hal tersebut perlu untuk dikaji kendala-kendala dan faktor yang ada dalam program tersebut. Serta dapat diukur sejauh mana pencapaian tujuan dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas kelas I Bandar Lampung. Dengan mengetahui progress yang telah dicapai oleh Lapas kelas I Bandar Lampung, dapat diketahui pula langkah apa yang selanjutnya akan diambil untuk mencapai tujuan dari pembinaan kerja dalam sistem pemasyarakatan. Maka judul penelitian ini adalah **“Implementasi Program**

Pembinaan Kerja Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang peneliti kaji, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai pengimplementasian program pembinaan kerja terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengembangkan pengetahuan terkait implementasi program pembinaan kerja.

2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi dari program pembinaan kerja di lapas kelas I kota Bandar Lampung.
- b. Penelitian juga diharapkan memberikan kontribusi pada pengetahuan administrasi publik, sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari dan mengatasi masalah-masalah yang ada
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai informasi atau referensi untuk pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi program pembinaan kerja terhadap narapidana telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama dari peneliti terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Chasanah & Hidayat (2019), menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini memnunjukkan bahwa implementasi program bimbingan dalam pemberdayaan narapidana ini berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan yang dibagi menjadi dua yaitu program kepribadian dan program kemandirian. Program tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan narapidana lebih produktif menuju manusia yang berdaya guna. Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini adalah fokus penelitian yang akan peniliti kaji, yaitu jumlah narapidana (warga binaan) yang mengikuti program pembinaan kerja, Hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian karena perbedaan fokus penelitian tersebut.
2. Yuli Kristyanto (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada di Lapas, Kendala-kendala dalam Pembinaan Narapidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Kedungpane Semarang yakni Kualitas dan Kuantitas Petugas, Pembinaan

yang dilakukan kurang maksimal dan kurangnya sarana prasarana. Dalam penelitian ini terdapat pembeda yang akan peneliti teliti yaitu teori yang digunakan dalam mengkaji masalah. Peneliti menggunakan teori Implementasi sedangkan yang digunakan oleh Yuli Kristiyanto menggunakan teori peran.

3. Yoga Adi Pramudhito (2021). Penelitian ini menjelaskan bahwa semua terpidana yang menjalani pidana setelah melalui putusan pengadilan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

2.2 Tinjauan Implementasi Program

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya (Darmawan, 2021). Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Implementasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menuju perubahan tersebut, karena dengan adanya implementasi maka secara langsung adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dari

penjelasan mengenai implementasi di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu program, baik itu di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi atau sekolah yang hasilnya dapat di lihat dari perbandingan pencapaian target dengan tujuan awal, sehingga dalam implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang sifatnya teknis sebagai upaya dari pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Pressman dan Wildavsky yang dikutip oleh Sutrisno (Sutrisno, 2021), mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu untuk menjalankan kebijakan, untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan, untuk menghasilkan output dalam tujuan kebijakan, dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam suatu kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Charles O. Jones (1984) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Selanjutnya Jones juga mengungkapkan bahwa implementasi program, adalah suatu proses interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi program merupakan kegiatan yang dijalankan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones, 1984)

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan (Purwanto & Sulistyastuti,

2021). Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya implementasi program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan program yang sebelumnya program tersebut telah berjalan sesuai kondisi yang ada baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat penunjang.

2.2.1 Konsep Implementasi Program

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten, model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Korten menggambarkan model kesesuaian implementasi program dengan berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu: program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program (Akib, 2010).

Penerapan model oleh David C. Korten menjelaskan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib, 2010).

Dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program.

Edward III (1980) beranggapan bahwa implementasi Program dapat dipengaruhi dari empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, komunikasi harus dilakukan secara efektif antara para pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tujuan ataupun sasaran kebijakan untuk selanjutnya dijelaskan dengan baik dan jelas kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi penyimpangan dalam implementasi.
- b. Sumber daya, apabila isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi dalam pelaksanaannya kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang layak dan memadai. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, kompetensi implementor dan juga sumber daya finansial.
- c. Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu karakteristik atau watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, antara lain kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila disposisi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan baik maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur organisasi, yaitu melaksanakan kebijakan program mempunyai pengaruh yang besar terhadap implementasi Program.

Dapat disimpulkan bahwa empat tahapan tersebut mempengaruhi pada konsep implementasi karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (Edward III, 1980).

Implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan-tindakan dari keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Meter & Horn (1975) menyatakan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan, proses implementasi kebijakan publik bisa diukur apabila ukuran dan tujuan dari kebijakannya realistis dengan budaya sosial yang ada di lingkungan pelaksana kebijakan.
- b. Sumber daya keberhasilan, proses implementasi kebijakan publik sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia.
- c. Karakteristik pelaksana, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan. Jangkauan wilayah implementasi kebijakan juga diperhitungkan apabila hendak menentukan para agen pelaksananya. Semakin luas wilayah implementasi kebijakan maka semakin besar pula pelaksana yang terlibat.
- d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana, sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan. Penerimaan dan penolakan akan mungkin terjadi karena kebijakan yang akan dilakukan merupakan hasil perumusan pemerintah bukan dari warga setempat yang mengetahui permasalahan yang dirasakan.
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas para pelaksana, semakin baik komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proses implementasi maka akan semakin kecil kesalahan-kesalahan yang terjadi.

- f. Faktor lingkungan (ekonomi, sosial, politik) yaitu tentang peran lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam proses implementasi perlu diperhatikan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sekitar agar mendukung dalam proses implementasi kebijakan.

Faktor-faktor yang disebutkan tersebut meliputi usaha-usaha mengubah keputusan yang telah ditentukan menjadi kegiatan operasional dalam periode waktu tertentu atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi kebijakan dipandang sebagai proses untuk melaksanakan program, pelaksana harus menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan dalam mengurus permasalahan lingkungan, kelompok sasaran dan hal lain (Meter & Horn 1975).

Pada proses implementasi, menurut Charles O. Jones (1984) ada tiga pilar aktivitas dalam proses implementasi program antara lain:

- a. Aktivitas Organisasi

Aktivitas organisasi merupakan kegiatan atau upaya dalam membentuk struktur, sumber daya dan metode untuk melaksanakan dan mengarahkan suatu program agar dapat berjalan dengan sesuai rencana, pedoman, standar, tujuan dan sasaran yang diinginkan. Terdapat beberapa indikator dalam aktivitas organisasi yaitu: 1) Struktur organisasi pelaksana, tugas pokok dan fungsi serta kesesuaian pekerjaan yang dilakukan, 2) Sumber daya material, 3) Standar Operasional Program, 3) Sasaran yang ingin dicapai.

- b. Aktivitas interpretasi

Aktivitas interpretasi merupakan kegiatan atau upaya penjelasan kepada pelaksana dan kelompok sasaran dalam bahasa yang mudah dipahami agar dapat dimengerti maksud dari program tersebut dan tata cara pelaksanaan serta aturan dalam kebijakan. Kegiatan ini dilakukan agar program dapat berjalan sesuai rencana, pedoman,

standar, dan tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa indicator dari interpretasi yaitu: 1) Komunikasi antar pelaksana dan warga binaan, 2) Monitoring, 3) Kesesuaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

c. **Aktivitas Aplikasi**

Aktivitas aplikasi merupakan kegiatan dan upaya pelaksanaan atau merealisasikan suatu kebijakan yang sesuai dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang diinginkan. Aktivitas aplikasi harus memuat prosedur kerja yang jelas sehingga kebijakan bisa berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun dan direncanakan agar tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya. Prosedur kerja juga digunakan untuk membantu pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dalam mengelola suatu pekerjaan tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan.

Penggunaan teori Charles O. Jones (1984) dalam penelitian ini dikarenakan Jones berpendapat bahwa aktivitas dalam proses implementasi dapat dilihat dari ketiga pilar aktivitas yakni aktivitas organisasi, interpretasi dan aplikasi. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung dan teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang telah peneliti tentukan.

2.3 Tinjauan Pembinaan Kerja

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan (Aulia, 2021).

Pembinaan Narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Pembinaan Kerja merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima, dan mengelolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Menurut Hasono (1995), Pembinaan Kerja Narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Aulia, 2021).

Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1) pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2) Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu (Aulia, 2021).

Berdasarkan definisi diatas pembinaan yang dimaksud tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana. Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakatan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana (Wulandari, 2012).

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

2.4 Tinjauan Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 7 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana

itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana);terhukum. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan . Yang mana Lapas itu sendiri merupakan suatu wadah bagi narapidana untuk menerima bimbingan atau pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, yang bisa diterima kembali di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya (Herliansyah, 2020).

Penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana itu sendiri.

Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak narapidana selama menjalani sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi dan cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Tinjauan Lembaga Permasyarakatan

Eksistensi lembaga pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah : Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera. Sedangkan Suharjo Widiada, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konseps sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah menjalani masa pidananya ia akan menjadi

anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar (Harahap, 2022).

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya akan disingkat dengan Lapas merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan kedalam Lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut (Haryani & Henda, 2019).

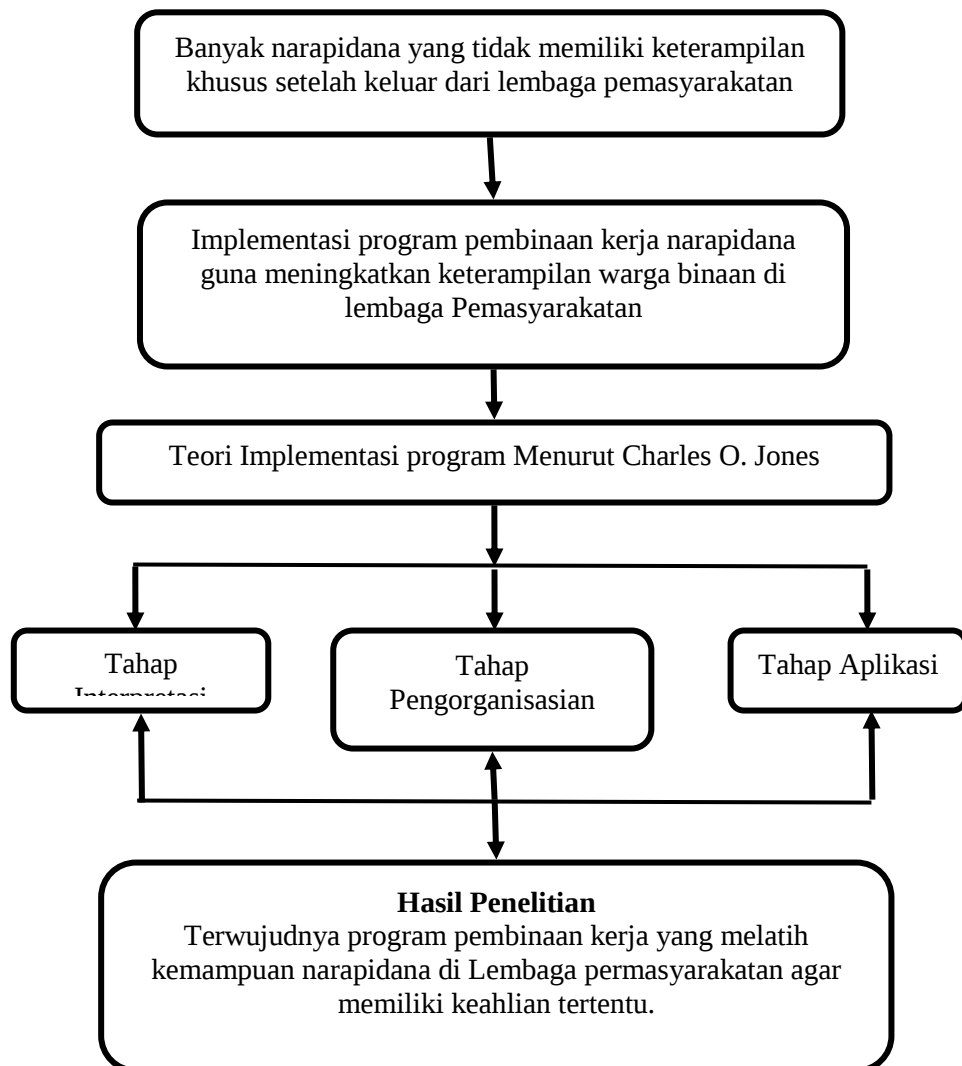
Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 1) Pengayoman , 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan, 2) Pendidikan, 4) Pembimbingan, 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini berawal dari banyaknya narapidana yang tidak memiliki keterampilan khusus setelah keluar dari Lembaga Perasyarakatan, sehingga dibuatlah suatu program untuk mengasah kemampuan para narapidana selama berada di Lembaga perasyarakatan yaitu program pembinaan kerja narapidana. Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sehingga peneliti ingin mengkaji permasalahan tersebut menggunakan perspektif teori implementasi program menurut Charles O. Jones (1984) dengan menggunakan tiga pilar aktivitas dalam proses implementasi program antara lain : Tahap Interpretasi, Tahap Pengorganisasian, dan Tahap Aplikasi. Teori tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan implementasi program pembinaan kerja narapidana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lembaga pemasyarakatan lapas kelas I Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pikir yang ada dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti memakai metode kualitatif karena ingin menggambarkan dan memperoleh pemahaman mendalam dengan menggambarkan kondisi atau fenomena yang sebenarnya terjadi selama penelitian lapangan dengan mengajukan pertanyaan terbuka pada informan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari penelitian langsung kepada objek dengan teknik wawancara langsung, catatan ilmiah dan dokumentasi resmi lainnya.

Menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud untuk menjelaskan mengenai bagaimana implementasi program Pembinaan Kerja Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Kota Bandar Lampung penelitian yang menggunakan rancangan atau desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengukur pengawasan di Lembaga pemasyarakatan kelas I Kota Bandar Lampung kemudian agar penelitian ini mendekati kondisi yang sebenarnya, maka hasil pengukuran yang telah dilaksanakan akan dilengkapi dengan pendapat-pendapat yang lebih komprehensif melalui *indepth interview* dari pada responden.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat membatasi suatu lingkup yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menentukan keputusan tepat mengenai data mana yang diperlukan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori indikator implementasi dari Jones (1984) dengan 3 indikator implementasi yaitu :

- a. Aktivitas pengorganisasian, pada tahap ini peneliti akan melihat tentang bagaimana pelaksana kebijakan membuat struktur organisasi pelaksana, tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor, sumber daya, perlengkapan, sarana dan prasarana, biaya operasional, serta sasaran yang ingin dicapai dari program Pembinaan Kerja di Lapas kelas I Kota Bandar Lampung.
- b. Aktivitas Interpretasi / Persiapan, pada tahap ini para pelaksana harus melakukan komunikasi antar pelaksana dan monitoring untuk menjalankan program Pembinaan Kerja di Lapas kelas I Kota Bandar Lampung sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan dapat tercapai. Pada tahap ini kebijakan diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh *stakeholders* dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan tadi.
- c. Aktivitas Aplikasi, pada tahap ini peneliti akan melihat apakah aparatur di Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kebijakan telah menggunakan atau mempunyai prosedur kinerja sesuai dengan pedoman standar dan tujuan yang diinginkan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Lapas ini, karena masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana yang ditemukan oleh peneliti dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada Penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain :

- a. Data Primer adalah berupa kata-kata dan tindakan informan serta fenomena-fenomena tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan hasil selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini adalah data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data dalam hal ini peneliti dari objek penelitiannya. Data tersebut diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui implementasi program pembinaan kerja narapidana di Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung
- b. Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh pada umumnya dapat berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan implementasi program pembinaan kerja dalam narapidana di Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian berupa tanya jawab kepada narasumber terkait. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan terkait yang dianggap sebagai informan kunci. Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dalam fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian (Sugiyono, 2013).

Informan yang dipilih sebagai informasi kunci adalah informan yang menguasai, memahami, mengerti dan terlibat langsung dengan topik penelitian. Informan peneliti dalam melakukan wawancara diantaranya :

Tabel 3 . Informan Penelitian

No	Narasumber	Nama	Tanggal Wawancara
1.	Kepala Bidang Bimbingan Kerja	Bapak Muda Husni, Bc.IP.,SH.,MM	28 Juni 2024
2.	Kepala Seksi Bimbingan Kerja	Bapak Edy Suyono, S.H.	28 Juni 2024
3.	Kepala Seksi Sarana Kerja	Bapak Ade Wijaya, S.I.P.	28 Juni 2024
4.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Fahri	29 Juni 2024
5.	Warga Binaan Pemasyarakatan	Adi	29 Juni 2024

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

b. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian di lapangan yang dimaksudkan untuk pengumpulan data. Nasution dalam kutipan Sugiyono (2013) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2013). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Bandar Lampung.

Tabel 4. Gambaran Objek Observasi Penelitian

No	Objek yang diamati	Informasi yang dicari
1.	Pembagian potensi dalam melaksanakan program pembinaan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas	Proses koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat
2.	Penyebaran informasi oleh pihak Lapas kepada WBP mengenai program pembinaan kerja	Sistematika komunikasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program pembinaan kerja

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

c. Studi Dokumentasi

Cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap mendukung dan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku-buku, laporan, jurnal, literatur, majalah dan peraturan

perundang-undangan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan kinerja, faktor pendukung dan faktor penghambat polisi khusus pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan narapidana di Lapas Kelas I Kota Bandar Lampung.

Tabel 5. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen	Informasi yang dicari
1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan
2.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan	Landasan hukum mengenai program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

3.6 Analisis Data

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013). Kegiatan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari hasil pengamatan di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Dengan melakukan reduksi data, dapat mempermudah peneliti memberikan gambaran yang lebih jelas agar mudah dimengerti bagi peneliti untuk menyajikan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, penyajian data berupa bentuk uraian teks naratif, bagan, table dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2013), dalam penelitian kualitatif, Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Terdapat beberapa teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono (2013) seperti:

a. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data digunakan untuk menghasilkan kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan cara peningkatan ketekunan dan triangulasi sumber.

b. Uji Transferability

Transferability digunakan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian, sehingga peneliti dapat memberikan laporan penjelasan secara terperinci, sistematis dan dapat dipercaya.

c. Uji Dependability

Uji *Dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan pengawasan peneliti, terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing. Peneliti harus dapat menunjukkan bagaimana cara menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

d. Uji Confirmability

Uji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian harus dapat disertakan proses penelitian sehingga memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada (Sugiyono, 2013)

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Peneliti berusaha untuk melihat bagaimana penerapan atau implementasi dari program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Kota Bandar Lampung yang mana hal ini sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut, yang selain dari penegak hukum, sekaligus lembaga pembinaan.

Didalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa berdasarkan teori Charles O. Jones (1984) :

- a. Penerapan indikator pengorganisasian dalam program bimbingan kerja di Lapas Kelas I Bandar Lampung menghadapi sejumlah hambatan seperti minimnya keikutsertaan warga binaan dalam berpartisipasi di program tersebut meskipun terdapat struktur tim pelaksana yang baik dan dukungan dari berbagai pihak. Faktor pendukung seperti fasilitas, tenaga pengajar yang kompeten, dan dukungan anggaran memberikan kontribusi positif, tetapi masalah utama terletak pada kurangnya kerjasama dengan pihak luar dan keterbatasan sarana prasarana yang perlu diperbarui.
- b. Interpretasi kebijakan di Lapas ini, Upaya Sosialisasi dan Monitoring telah dilakukan sosialisasi (penyuluhan) dan monitoring (pengawasan) untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan, tetapi hasilnya masih beragam. sehingga berdasarkan hasil penelitian indikator interpretasi yang sesuai dengan pendapat Jones (1984) telah diterapkan pada lapas kelas I Kota Bandar Lampung.
- c. Pada indikator aplikasi menunjukkan bahwa program pembinaan kerja di Lapas Kelas I Bandar Lampung terlaksana berdasarkan SOP yang berlaku sehingga program dapat berjalan dengan baik dan juga di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan dalam beberapa aspek seperti

keterampilan, serta aspek lingkungan dan berkelanjutan sebagai bekal bagi warga binaan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini berpotensi mengurangi efektivitas program pembinaan kerja di Lapas. Berdasarkan teori Jones (1984) sebagian besar indikator yang disampaikan seperti pengorganisasian, pengintegrasian, serta pengaplikasiannya sudah hampir efektif dalam penerapannya pada program pembinaan kerja yang dikelola oleh Lapas kelas I Kota Bandar Lampung. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi Lapas kelas I Kota Bandar Lampung dengan beberapa faktor penghambat efektivitas pembinaan di Lapas, antara lain: Kekurangan Peralatan, Kekurangan Dana, dan Latar Belakang Pendidikan Warga Binaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan yaitu:

- a. Membangun kemitraan dengan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk meningkatkan dukungan sumber daya dan kesempatan kerja bagi warga binaan.
- b. Mengedepankan inisiatif yang mendorong partisipasi aktif warga binaan dalam proses pembinaan, misalnya dengan melibatkan mereka dalam perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa lebih memiliki program tersebut.
- c. Melakukan evaluasi dan pemeliharaan berkala terhadap sarana dan prasarana yang ada. Mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak, serta merencanakan pengadaan peralatan baru yang dapat mendukung kegiatan pelatihan. Mencari sumber pendanaan tambahan untuk memperbaiki fasilitas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, M. N., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi di Lapas Klas IIA Cibinong. *Hukum Responsif*, 13(2), 50-56.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Anggita, D. C., & Pangestuti, N. (2024). Pembinaan Kemandirian dalam Rangka Peningkatan Keterampilan Narapidana. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 109-166.
- Aulia, T. (2021). Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas I Makasar.
- Avandi, N. S., & Subroto, M. (2023). Implementasi Program Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIB Sleman. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(Khusus), 297-310.
- Chasanah, K., & Hidayat, Z. (2019). Implementation Of Working Programs In Empowerment Of Private Vocational School In Community Institution In Iia Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(3), 312-328.
- Darmawan, A. F. (2020). Tinjauan Tentang Implementasi Program GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminitrasi Kependudukan) Pada Kantor Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur. *Administrasi Publik*.
- Dongoran, M. F., Lahinda, J., & Nugroho, A. (2021). Pembinaan Kesehatan Mental Dengan Intervensi Senam Yoga Pada Warga Binaan Lapas II B Merauke. *Jurnal Masyarakat Negeri Rokania*, 2(1), 6-12.
- Fatahilah, S., & Jarodi, O. (2023). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).

- Harahap, K. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 10(1), 399-406.
- Henda, Y. H. (2019). Implementasi Proses Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Cirebon (Studi di Lembaga Kelas I Cirebon). *HUKUM RESPONSIF*, 10(1), 32-44.
- Herliansah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kewirausahaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 4(1), 1-12.
- Herliansyah, A. R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 212-221.
- Ibrahim, R. (2024). Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian Bimker Pastar Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, 6(4).
- Jone, Charles O. (1994). *Pengantar kebijakan publik = (public policy)*; penerjemah, Ricky Istamto ; editor, Nashir Budiman.
- Jones, C. O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kristyanto, Y. (2022). Peranan Polsuspas (Polisi Khusus Pemasyarakatan) Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Terpidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang).
- Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.
- Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education*.
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana di Indonesia : Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* . Yogyakarta: Gava Media.
- Sriwidodo, U., & Haryanto, A. B. (2010). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Komunikasi dan Kesejahteraan terhadap Kinerja Pegawai Dinas (Sutrisno, Syakdiah, & Kusumawiranti, 2021) Pendidikan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tsauri, S. (2014). *Manajemen Kinerja (Performance Management)*. Jember: STAIN Jember Press.

Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 131-142.

III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Lembaran Negara RI No. 77. Sekretariat Negara.

Indonesia. (2012). Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tekhnis terhadap Kepolisian Khusus Perasyarakatan. Lembaran Negara RI No. 74. Kemenkumham.

Indonesia. (2006). Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Polisi Khusus Perasyarakatan. Polri